

# Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas

Annisa Fitri<sup>1</sup>, Eri Triharyati<sup>2</sup>, Hardi Mulyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Manajemen, Universitas Bina Insan, LubukLinggau  
[1901010044@mhs.univbinainsan.ac.id](mailto:1901010044@mhs.univbinainsan.ac.id), [3triharyati@gmail.com](mailto:3triharyati@gmail.com),  
[hardi\\_mulyono@univbinainsan.ac.id](mailto:hardi_mulyono@univbinainsan.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 7 September 2023

Disetujui : 18 September 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT

*The problem examined in this study is about the Financial Performance of the Culture and Tourism Office of Musi Rawas Regency in terms of Efficiency, Effectiveness and Harmony Ratios. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that the Financial Performance of the Culture and Tourism Office of Musi Rawas Regency in terms of Efficiency Ratio, from 2017 to 2022 can be categorized as inefficient with an average efficiency ratio value of 93,6%. The Financial Performance of the Musi Rawas Regency Culture and Tourism Office in terms of the Effectiveness Ratio, from 2017 – 2022 as a whole is in the effective criteria with an average effectiveness ratio value of 94%. The Financial Performance of the Office of Culture and Tourism of Musi Rawas Regency in terms of the Conformity Ratio, from 2017 – 2022 can be said to be compatible, with an average compatibility ratio value of 77,3%. The results of this research are expected to be useful for the Culture and Tourism Office of Musi Rawas Regency. They need to pay more attention to things that can be a potential source of income, such as paying special attention to tourist objects.*

**Keywords:** Financial Reports, Financial Performance

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran Daerah adalah sebuah perencanaan keuangan yang merupakan pembelanjaan daerah dalam satu periode tahun anggaran. APBD ini dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran, dan ukuran standar evaluasi kinerja serta alat koordinasi semua aktivitas di berbagai unit kerja (Nita, 2018).

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh. Evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja serta memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hera, 2021) menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasi lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015–2018 sudah efisien. Persentase dari rasio efisiensi seluruhnya tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efisiensi. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan tahun 2015–2018 sudah mencapai tingkat efektif. Persentase dari rasio efektivitas secara keseluruhan berada pada standar efektivitas 90–100 % yang berarti masuk kategori efektif.

Hasil penelitian terdahulu oleh Fitriani (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Rasio kemandirian yang masih sangat rendah sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan ditinjau dari Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Keserasian.

## STUDI LITERATUR

### Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut (Fahmi, 2018) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut (Kasmir, 2017) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

### Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut (Sari, 2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar (Fahmi, 2018).

Indikator kinerja keuangan dicerminkan oleh rasio-rasio, bagi perusahaan indikator rasio-rasio ini akan menjadi salah satu titik fokus dalam pengambilan keputusan (Kamaludin, 2016).

Untuk mengetahui kinerja keuangan diperlukan metode dan teknik analisis laporan keuangan yang tepat (Kasmir, 2017). Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal.

#### Rasio Efisiensi, Efektivitas, dan Keserasian

Menurut (Mahmudi, 2019), Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Rasio Efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Definisi Efektivitas menurut (Mahmudi dalam Hera, 2021), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Rasio Efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal (Halim, 2017). Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Keserasian dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

### METODE

Penelitian ini berjudul “Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.” Langkah awal dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya membuat instrumen penelitian berupa wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya mengumpulkan data keuangan dan menganalisis data keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dan melaporkan ke dalam bentuk skripsi.

Menurut (Sugiyono, 2020) dalam penelitian teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan: wawancara yaitu wawancara dengan objek penelitian; observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian; dan dokumentasi yaitu pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan Sub bagian keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas yang berhubungan dengan laporan keuangan dan kinerja keuangan.
2. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas mengenai laporan keuangan dan kinerja keuangan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dan meliputi sejarah umum, struktur organisasi, aktivitas, laporan keuangan tahun 2017-2022.

Tenik analisis yang digunakan yaitu dengan cara menghitung Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Keserasian seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Untuk mengukur Rasio Efisiensi, Efektivitas, Keserasian digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100 % keatas	Tidak efisien
2	90 - 100 %	Kurang Efisien
3	80 - 90 %	Cukup Efisien
4	60 - 80 %	Efisien
5	kurang 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997 dalam (Anton, 2017)

Tabel 2. Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100 % keatas	Sangat efektif
2	90 - 100 %	Efektif
3	80 - 90 %	Cukup efektif
4	60 - 80 %	Kurang efektif
5	kurang 60 %	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997 dalam (Anton, 2017)

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keserasian Keuangan

No	Proporsi umum belanja modal dengan belanja daerah	Kriteria
1	60 - 90%	Serasi
2	Kurang dari 60%	Tidak Serasi

Sumber: Mahmudi dalam (Hera, 2021)

## HASIL

### Analisis Rasio Efisiensi

Berikut tingkat perkembangan efisiensi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perkembangan Efisiensi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Nilai Efisiensi	Kriteria
2017	4.399.585.500	4.263.460.045	97%	Kurang efisien
2018	6.324.774.000	6.047.708.092	96%	Kurang efisien
2019	12.519.769.000	11.197.161.852	89%	Cukup efisien
2020	11.252.096.867	10.773.923.867	96%	Kurang efisien
2021	7.082.609.182	6.257.786.357	88%	Cukup efisien
2022	5.617.619.785	5.397.487.321	96%	Kurang efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>93,6%</b>	<b>Kurang efisien</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 4. di atas, menggambarkan bahwa tingkat efisiensi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas selama periode 2017, 2018, 2020 dan 2022 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien. Hanya pada tahun 2019 dan 2021 efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas berada pada tingkat cukup efisien dengan nilai rasio berturut-turut adalah 89% dan 88%.

### Analisis Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan, tingkat perkembangan efektivitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Efektivitas Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Nilai Efektivitas	Kriteria
2017	4.290.974.045	4.455.835.500	96%	Efektif
2018	6.069.008.095	6.381.024.000	95%	Efektif
2019	11.197.161.852	12.519.769.000	89%	Cukup efektif
2020	10.753.723.676	11.212.159.367	96%	Efektif
2021	6.249.285.357	7.002.734.182	89%	Cukup efektif
2022	5.365.337.321	5.533.751.035	97%	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>94%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 5. di atas, terlihat bahwa rasio efektivitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2022 rasio efektivitas mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan efektivitas keuangan daerah rata-rata berada pada kriteria efektif dengan nilai 94%.

### Analisis Rasio Keserasian

Tingkat perkembangan rasio keserasian keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Keserasian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Nilai Efektivitas	Kriteria
2017	3.903.947.045	4.263.460.045	91%	Serasi
2018	5.304.358.092	6.047.708.092	88%	Serasi
2019	7.947.363.052	22.394.323.704	35%	Tidak Serasi
2020	6.221.568.676	10.773.923.676	58%	Tidak Serasi
2021	6.065.278.557	6.257.786.357	96%	Serasi
2022	5.379.487.321	5.599.619.785	96%	Serasi
<b>Rata-rata</b>			<b>77,3%</b>	<b>Serasi</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Rasio keserasian pada tahun 2017-2022 memiliki nilai persentase yang berfluktuatif. Pada tahun 2017 persentase rasio adalah sebesar 91% atau dapat dikatakan serasi, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 88% dan dapat dikatakan serasi. Pada tahun 2019, kembali menurun pada angka 35% dikatakan tidak serasi. Sedangkan pada tahun 2010, rasio naik menjadi 58% dikatakan tidak serasi dan tahun 2021-2022 sebesar 96% dan dapat dikatakan serasi.

## PEMBAHASAN

### Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Tingkat efisiensi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas selama periode 2017, 2018, 2020, dan 2022 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien karena terletak pada interval 90 – 100%. Hanya pada tahun 2018 dan 2021 efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas berada pada tingkat cukup efisien dengan nilai rasio berturut-turut adalah 87% dan 88% karena terletak pada interval 80 – 90% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997).

Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 97% atau dapat dikatakan kurang efisien. Tahun 2018 rasio efisiensinya meningkat menjadi 96% atau kurang efisien, dan tahun 2019 turun menjadi 89% atau dapat dikatakan cukup efisien. Tahun 2020 rasio efisiensinya meningkat kembali menjadi 96% atau dikatakan kurang efisien. Untuk tahun 2021 rasio efisiensi turun kembali menjadi 88% atau cukup efisien. Tahun 2022 efisiensi naik menjadi 96% atau kurang efisien.

Kurang Efisiennya kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas karena total belanja masih lebih besar daripada pendapatan terutama pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas sudah dapat menekan sedikit belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan realisasi. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan dari segi efisiensi masih kurang baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Semakin besar nilai rasio efisiensi keuangan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menyangkut perbandingan output dan input pelaksanaan kegiatan. Semakin besar belanja artinya semakin besar input yang digunakan sementara kualitas output yang dihasilkan hanya dapat diukur dengan ukuran seberapa besar efek kegiatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan. Input yang terlampaui besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan (biaya) biaya yang sedikit. Rasio Efisiensi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas selama periode 2017, 2018, 2020 dan 2022 mencapai rata-rata 96% yang artinya rata-rata nilai realisasi belanja mencapai 96% dari nilai realisasi pendapatan pertahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai rasio efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebesar 93,6% dengan kriteria kurang efisien.

Untuk kedepannya diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja organisasi. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Hera (2021) yang berjudul Analisis Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 –2018 sudah efisien. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015–2018 sudah mencapai tingkat efektif.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa rasio efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dikategorikan Kurang Efisien dengan rata-rata nilai rasio efisiensi 93,6%.

### **Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Rasio efektivitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas berada pada kriteria efektif. Rasio efektivitas keuangan daerah memberikan gambaran bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dalam merealisasikan PAD dari nilai target anggarannya. Rasio ini merupakan besar persentase PAD yang terealisasi dibandingkan target anggarannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas memaksimalkan potensi PAD agar dapat terserap secara optimal misalnya melalui pajak dan retribusi tempat wisata. Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2017 sebesar 96%, tahun 2018 sebesar 95%, tahun 2019 turun menjadi 89% penurunan ini disebabkan adanya dampak kelesuan ekonomi dan adanya wabah covid 19. Covid 19 ini sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak retribusi objek wisata pada periode tersebut. Di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 96%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89% dan kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 97%. Kondisi rasio efektivitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas tahun 2017-2022 dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% ((Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997).

Efektivitas kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2017 dan 2022 berjalan Efektif karena efektivitasnya diatas 90%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi tempat wisata melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah di tentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Fitriani (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Rasio kemandirian yang masih sangat rendah Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa rasio efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara keseluruhan berada pada kriteria tidak efektif dengan rata-rata nilai rasio efektifitas sebesar 94%.

### **Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Keserasian**

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berdasarkan dari analisis rasio keserasian belanja operasi dan total belanja di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas sebagian besar dana diprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja operasi relatif kecil. Rasio total belanja masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja operasi. Besarnya alokasi dana untuk total belanja terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk kegiatan operasi kantor.

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Riger (2017) hasil penelitian menunjukkan keuangan kinerja Kabupaten Gunungkidul dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan efektif. (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien. (3) Rasio Kesesuaian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan paling banyak dari anggarannya untuk belanja operasional daerah yang dibandingkan dengan rata-rata belanja modal.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga total relative kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata total belanja. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas kantor. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas kecil atau belum terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa rasio efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan kurang efisien dan cukup efisien. Untuk rasio efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan tidak efektif. Dan untuk rasio keserasian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan serasi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Efisiensi, dari tahun 2017-2022 dapat dikategorikan kurang efisien. Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Efektivitas, dari tahun 2017-2022 secara keseluruhan berada pada kriteria efektif. Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Keserasian, dari tahun 2017-2022 dapat dikatakan serasi.

### REFERENSI

- Chinedu Innocent, E., Ifeoma Mary, O., & Monday Matthew, O. (2013). Financial Ratio Analysis as a Determinant of Profitability in Nigerian Pharmaceutical Industry. *International Journal of Business and Management*, 8(8), 107–117. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n8p107>
- Disbudpar. (2017). *Laporan Keuangan Disbudpar Kabupaten Musi Rawas*. Musi Rawas. Disbudpar Kab.Musi Rawas
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanafi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- John, S. (2017). *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. BFFE.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Martiastuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29–36. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v6i2.16990>
- Munawir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Prabowo, S. C. B., & Korsakul, N. (2020). Analysis of Financial Performance of Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 28–45. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.01.03>

- Purwaningsih, H., & Khabibah, N. A. (2021). Analisis Anggaran Belanja Untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261>
- Saragih, F., Siregar, I. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja*. 43–53.
- Sirait, P. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Ekuilibria.
- Sofyan, S. (2016). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Sudana, I. (2016). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis. In *Manajemen Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin. (2017). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Raja Grafindo Persada.
- Tim. (2022). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Bina Insan.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Wiratna, S. (2017). *Manajemen Keuangan*. Pustaka Baru Press.